




BULETIN DPRD KOTA MEDAN

Media Komunikasi dan Informasi DPRD Kota Medan



 dprd.pemkomedan.go.id

 [Sekretariat DprdMedan](#)

 [humasdprdkotamedan](#)

 [Sekretariat DprdMedan](#)

 [@dprdmedan1](#)



*Edisi
Juli s.d. September
2022*



Ketua DPRD Kota Medan menghadiri *Colorful Medan Carnival*



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri acara "*Colorful Medan Carnival*", **Jumat** (01/07/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Balai Kota Medan ini merupakan rangkaian acara dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-432 Kota Medan yang dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Sekda Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, M.M., unsur Forkopimda Kota Medan, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan.



Jamuan Makan Malam dan Ramah Tamah dalam Rangka Rapat Kerja Komisariat Wilayah 1 APEKSI



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri acara "Jamuan Makan Malam dan Ramah Tamah dalam rangka Rapat Kerja Komisariat Wilayah 1 APEKSI", **Kamis** (30/06/2022).

Selain mempererat silaturahmi dan kolaborasi, jamuan makan malam bertajuk malam ramah tamah ini juga dimeriahkan dengan penampilan beragam musik dan tarian dari sejumlah etnis di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Medan merupakan kota multietnis dengan kerukunanwarganya hidup dalam keberagaman.

Malam ramah tamah yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan tersebut, turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Sekda Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, M.M., unsur Forkopimda Kota Medan, para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan serta Camat se-Kota Medan.

Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan.



Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi ke-432 Kota Medan



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi ke-432 Kota Medan", **Jumat** (01/07/2022).

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Sekda Kota Medan Ir. Wiriya Arahman, M.M., unsur Forkopimda Kota Medan, para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, pimpinan organisasi masyarakat, serta TP. PKK Kota Medan.

Kegiatan ini berlangsung di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara, Jalan Almamater USU.

Silaturahmi dari Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Marga Gulo Indonesia (DPW PERMAGI)

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima kunjungan silaturahmi dari Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Marga Gulo Indonesia (DPW PERMAGI), **Senin** (04/07/2022).

Audiensi ini sebagai koordinasi dan sinergi sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Medan.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan



Silaturahmi dari Tim Kajian Etnografik Reasearch Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU dan Lembaga Pelestarian Budaya Tionghoa Yayasan Istana Harta Lima Penjuru

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Kajian Etnografik Reasearch Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU dan Lembaga Pelestarian Budaya Tionghoa Yayasan Istana Harta Lima Penjuru, **Senin** (04/07/2022).



Audiensi ini sebagai koordinasi dan sinergi sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Medan dalam mendukung program Medan Berkah.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Silaturahmi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, **Selasa** (05/07/2022).

Audiensi ini sebagai koordinasi dan sinergi sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Medan.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Kunjungan Kerja Kota Bekasi



MEDAN - Sekretariat DPRD Kota Medan menerima Kunjungan Kerja dari Pimpinan DPRD Kota Bekasi beserta Sekretariat DPRD Kota Bekasi, **Selasa** (05/07/2022).

Agenda Kunjungan Kerja ini terkait sharing informasi mengenai "Hak Keuangan Administrasi DPRD serta Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Luar Negeri DPRD".

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Medan.





Upacara Hari Bhayangkara ke 76 Tahun

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri upacara Hari Bhayangkara ke-76 Tahun dan Syukuran", **Selasa** (05/07/2022).

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Letjend. TNI (purn) Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum., Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, Pangdam I/BB, seluruh pejabat utama Polda Sumut, unsur Forkopimda Kota Medan, Konjen negara sahabat, tokoh pemuda dan masyarakat, serta para pejabat tinggi lainnya.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bola Markas Polisi Daerah Sumatera Utara juga dihadiri Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo secara virtual.

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Senin** (11/07/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H.T. BahrumSyah S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam nota pengantar yang disampaikan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengatakan perlunya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang didorong oleh banyaknya dinamika dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memberikan dampak perlunya mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing daerah termasuk Kota Medan.

Melalui Ranperda ini nantinya, Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan DPRD Kota Medan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang riil', kata Bobby Nasution. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan rapat ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga terciptanya manajemen keuangan yang lebih baik, mulai dari tata cara, prosedur, dan mekanismenya.

Jadi nanti ada satu peraturan yang dipedomani, sehingga keuangan daerah bisa lebih baik lagi ke depannya', kata Hasyim. Selanjutnya, Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diakhiri dengan foto bersama. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

DPRD Kota Medan Mengajukan Usul atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Anggota DPRD Kota Medan yang Mengajukan Usul atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, **Senin** (11/07/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H.T. Bahrumsyah S.H., M.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan lainnya.

Secara umum, terdapat beberapa kelemahan perlindungan penyandang disabilitas di Kota Medan, diantaranya akses disabilitas di kantor pemerintahan khususnya di kantor pelayanan publik, sebab penyandang disabilitas mengalami kesulitan jika hendak datang ke kantor pelayanan publik. Selain itu Kota Medan tidak memiliki Peraturan Daerah Disabilitas untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan serta infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas.

Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., dengan harapan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Medan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan saat ini di Kota Medan dengan jumlah penduduk yang besar, di dalamnya terdapat banyak penyandang disabilitas dan lanjut usia, tapi belum ada satu payung hukum yang memberikan perlindungan hak-hak mereka.

“Kita lihat banyak fasilitas umum belum mendukung sepenuhnya untuk ruang gerak dari penyandang disabilitas. Ini harus dipikirkan oleh Pemerintah Kota Medan, tentu untuk menghadirkan itu perlu suatu payung hukum yang jelas, supaya para disabilitas dan lanjut usia itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemerintah Kota Medan”, kata Hasyim.

“Kami berusaha untuk menghadirkan satu Peraturan Daerah yang bisa memberikan kepastian hak-hak kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia”, tandasnya.

Rapat Paripurna ditutup dengan pengumuman perubahan komposisi personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 periode kedua.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



AFIF ABDILLAH :

Berharap realisasi pendapatan bisa benar terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan



MEDAN - Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Evaluasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan terkait Realisasi Anggaran Triwulan II dan rencana ke depan, **Selasa** (12/07/2022).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Afif Abdillah, S.E., selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, serta didampingi Anggota Komisi 3 lainnya.

Dalam wawancaranya, Afif Abdillah mengatakan rapat ini terkait realisasi anggaran BP2RD triwulan kedua dan perencanaan ke depan seperti bagaimana pencapaian PAD dan anggaran lain yang telah ditetapkan.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan ini berharap realisasi pendapatan bisa benar terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

'Kami berharap anggaran yang sudah diberikan kepada BP2RD benar-benar digunakan sesuai tepat guna, efektif dan efisien, sehingga bisa membantu BP2RD dalam merealisasikan pendapatan itu', tandas Afif Abdillah.



Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2022



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2022 dengan tema `Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Fungsi Dewan Melalui Program Kerja DPRD untuk Mewujudkan Medan Kota Kolaborasi yang Berkah, Maju dan Kondusif` di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, **Minggu (17/07/2022)**.

Rapat Kerja ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., yang ditandai dengan pemukulan gong, didampingi Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., para Wakil Ketua DPRD, serta Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., menyampaikan keinginan agar Raker ini dapat dijadikan momentum untuk mengambil langkah-langkah strategis dan memiliki konsep yang terukur dan jelas guna mendukung perubahan Kota Medan menjadi semakin baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.

`Kita bersyukur punya pemimpin yang memiliki semangat besar untuk membangun Kota Medan. Maka dari itu, kami berharap DPRD juga turut serta membantu Pemko Medan dalam pembangunan kota sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat`, kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengajak untuk sama-sama mengawal agar program kerja yang telah disepakati dapat diimplementasikan pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, taat hukum dan taat asas. Selain itu mengawal program kerja Pemerintah Kota Medan agar tepat guna dan tepat sasaran melalui mekanisme yang akuntabel sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Kita berharap DPRD bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Medan untuk membangun Kota Medan yang lebih baik, menuju Medan Kota Kolaborasi yang Berkah, Maju dan Kondusif", tandas Hasyim.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari penuh diisi dengan agenda kegiatan yang diawali dengan diskusi panel dan pemberian materi oleh Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Praktisi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Rapat Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan



MEDAN - Panitia Khusus DPRD Kota Medan menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan, **Senin (25/07/2022)**.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan, H. Surianto, S.H., dan dihadiri Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dan Bagian Hukum Setda Kota Medan.

Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan, H. Surianto, S.H., mengatakan rapat ini merupakan lanjutan pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan.

Ranperda ini tinggal finalisasi karena ada Undang-Undang yang baru disahkan pada bulan Maret 2022. Jadi kita akan mensinkronkan Perda yang akan kita terbitkan dengan Undang-Undang yang terbaru. Jadi kita menunggu dari Bagian Hukum dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mensinkronkan Perda yang akan disahkan oleh DPRD.

Surianto (Butong) berharap Perda yang akan diterbitkan bisa diterima oleh masyarakat Kota Medan untuk kemajuan keolahragaan menjadi lebih baik lagi.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Rapat Dengar Pendapat terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, Pelanggaran Bangunan menyimpang dari SIMB dan Pembuatan Pelebaran Drainase



MEDAN - Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan OPD terkait mengenai Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, Pelanggaran Bangunan Menyimpang dari SIMB, dan Pembuatan Pelebaran Drainase, **Senin (25/07/2022)**.

Rapat ini merupakan bentuk tanggapan dari Komisi 4 DPRD Kota Medan terkait adanya pengaduan dari Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka (P2BLM) dan Komunitas Pedagang Buku Lapangan Merdeka (KOPEBLAM) terhadap relokasi tempat baru bagi para pedagang buku agar cepat diselesaikan, sehingga mereka dapat berdagang kembali.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T., didampingi Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan lainnya yang dihadiri Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, perwakilan Kecamatan/Kelurahan, serta para warga yang bersangkutan.

Selain itu, RDP ini juga membahas terkait izin bangunan yang melanggar atau menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan kondisi fisik bangunan di lapangan. Serta menanggapi keluhan warga mengenai pembangunan pelebaran drainase yang belum selesai.

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T., mengatakan terkait penjadwalan kinerja bulan Juli 2022, Komisi 4 DPRD Kota Medan sudah merealisasikan surat-surat masuk dari masyarakat antara lain mengenai pedagang buku yang ada di Lapangan Merdeka, masalah izin bangunan yang beredar di Kota Medan yang tidak sesuai antara fisik dan surat yang dikeluarkan oleh Dinas PTSP dan Perkim, kemudian terkait keluhan warga mengenai pembangunan drainase sampai sekarang belum selesai.

‘Kita sebagai pelayan masyarakat harus terdepan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Harapan kita, seperti OPD terkait yang kita undang untuk memenuhi RDP ini harus lebih kooperatif lagi, karena kita sama-sama bekerja sebagai pelayan di masyarakat’, kata Haris Kelana.

RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022



MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, **Senin (25/07/2022)**.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M.; H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya, serta dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I

MEDAN - Dalam rangka pelaksanaan evaluasi berkelanjutan dan monitoring pencapaian target kinerja atas rencana aksi dalam kerangka SAKIP dan penyerapan anggaran Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 serta persiapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2023, Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I, **Senin (25/01/2022)**.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., dan dihadiri para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional/Subkoordinator dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Transit DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Ranperda yang Menjadi Skala Prioritas



MEDAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Internal Bapemperda terkait Pembahasan Delapan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang akan menjadi skala prioritas untuk diharmonisasikan, **Senin (25/07/2022)**.

Rapat ini sehubungan dengan dilanjutkan kembali Kajian Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Ranperda Kota Medan antara lain terkait Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution, S.T., didampingi Anggota Bapemperda lainnya dan berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Kegiatan Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kota Medan

MEDAN - Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan pertemuan rutin di Ruang Serbaguna DPRD Kota Medan, **Selasa (26/07/2022)**.

Pertemuan ini dipimpin oleh Ny. Rina Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., selaku Ketua Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kota Medan.

Ny. Rina Ali Sipahutar berharap dengan pertemuan ini, ikatan kekeluargaan yang terjalin akan semakin kuat dan terus berkembang, sekaligus membangun motivasi dan semangat baru untuk lebih meningkatkan kinerja dan berkarya, serta mengembangkan kreativitas dalam memajukan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama.



Rapat Dengar Pendapat terkait Stabilitas dan Ketersediaan Pangan Kota Medan



MEDAN - Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Kerja dengan Dinas Perdagangan Kota Medan terkait Stabilitas dan Ketersediaan Pangan Kota Medan, **Selasa (26/07/2022)**.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Afif Abdillah, S.E., selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, didampingi Anggota Komisi 3 lainnya, serta dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan. Dalam wawancaranya, Afif Abdillah mengatakan rapat ini terkait tentang harga bahan pokok di Kota Medan yang akhir-akhir ini banyak masyarakat yang komplain tentang kenaikan harga bahan pokok, terutama harga cabai.

Nanti kita cek mekanisme pasar seperti apa, dan juga rencananya dalam waktu dekat kita akan sidak dan kunjungan ke pasar maupun produsen-produsen yang terkait dengan bahan pokok tersebut, sehingga kita bisa jaga jangan sampai terlalu tinggi nanti harganya dari bawah, agar sampai ke masyarakat tidak terlalu tinggi, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.

Afif Abdillah berharap dengan adanya pembahasan ini dan dalam waktu dekat adanya kunjungan dan sidak, lebih bisa kita kontrol mekanisme harga pasar. Hari ini mekanisme harga pasar terutama harga cabai masih sangat rancu, dan harusnya dengan pengontrolan ataupun monitoring yang ketat dari Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Medan bisa kita kontrol lagi harganya, tandas Afif Abdillah.

Balai Kota Fashion Fest 2022

MEDAN - Dalam rangka menutup Kegiatan HUT ke-432 Kota Medan dan menyambut peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, Pimpinan DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Beranda Kreatif Medan, **Minggu (31/07/2022)**.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan ini dihadiri oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta warga Kota Medan.

Kegiatan yang mengusung tema "Balai Kota Fashion Fest 2022" ini berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan. Balai Kota Fashion Fest 2022 merupakan kegiatan yang menggelar Festival Busana yang Unik, Menarik dan Kreatif sebagai upaya mengangakat produk-produk UKM yang ada di Kota Medan.





Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Senin (01/08/2022)**.

Rapat ini merupakan lanjutan dari Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna yang lalu. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H.T. Bahrumsyah S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan masing-masing fraksi menyampaikan pentingnya adanya satu Peraturan Daerah (Perda) menjadi turunan dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengharuskan Pemerintah Daerah termasuk Kota Medan untuk segera menindaklanjuti berupa peraturan turunan dari Permendagri dan PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Sebenarnya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009 telah ada, hanya saja saat ini tidak relevansi lagi. Tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik lagi. Jadi kita berharap nantinya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ini bisa lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih partisipatif, sehinggal nanti manajemen keuangan Pemerintah Kota Medan lebih baik dan lebih profesional lagi", kata Hasyim.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan Nota Pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.





RAPAT PARIPURNA
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN
TERHADAP NOTA PENGANTAR KEPALA DAERAH
TERHADAP RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sebagian Besar Fraksi Mendukung adanya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, **Senin (01/08/2022)**.

Rapat ini merupakan lanjutan dari Penjelasan Anggota DPRD Kota Medan yang Mengajukan Usul atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rapat Paripurna yang lalu. Dalam penyampaiannya, sebagian besar fraksi mendukung adanya perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia demi kehidupan yang layak dan setara dengan masyarakat lainnya, salah satunya mengenai pendidikan bagi disabilitas dan kesehatan untuk lansia.

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan pandangan fraksi-fraksi pada prinsipnya hampir sama, para Anggota DPRD Kota Medan sangat positif yang artinya mereka menyambut baik dengan hadirnya Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

"Ini artinya ada support, ada dukungan dari semua fraksi-fraksi supaya Ranperda ini nantinya bisa menjadi inisiatif DPRD Kota Medan. Sampai hari ini, di Kota Medan belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia, terkait dengan fasilitasnya, sarana dan prasarana, pemberdayaan agar kesehatannya lebih baik, termasuk fasilitas umum yang bisa mendukung penyandang disabilitas bisa beraktifitas dengan baik".

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H.T. BahrumSyah S.H., M.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan lainnya berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Rapat Pembahasan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 s.d 2035

MEDAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan melaksanakan rapat terkait Pembahasan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 s.d. 2035, **Selasa** (02/08/2022).



Rapat yang dipimpin oleh Dedy Aksyari Nasution, S.T., selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan ini dihadiri Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan serta Bagian Hukum Setda Kota Medan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022



MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Selasa** (02/08/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan, serta OPD terkait lainnya.

Rapat Lanjutan Badan Anggaran DPRD Kota Medan terkait KUA - PPAS Tahun Anggaran 2022

MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Senin (08/08/2022)**.



Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang sudah berlangsung selama dua hari di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan, serta OPD terkait lainnya yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Senin (08/08/2022)**.

Rapat ini merupakan lanjutan dari Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna yang lalu. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam Nota Tanggapan Kepala Daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., dan Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., bahwa seluruh materi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang telah disampaikan sebelumnya akan menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi bersama pada proses pembahasan selanjutnya.

"Kami secara sungguh-sungguh memperhatikan seluruh tanggapan, saran, dan masukan bahkan kritisi yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD dalam Pemandangan Umum terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebab kami menganggap keseluruhan Pemandangan Umum tersebut merupakan catatan-catatan strategis sekaligus saran dan masukan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota pada masa yang akan datang, guna mewujudkan masyarakat kota yang berkah, maju, dan kondusif, khususnya melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel", kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., mengatakan bahwa tanggapan dari Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Medan menganggap itu adalah saran yang baik yang akan disampaikan kepada Pemko Medan untuk menjadi pertimbangan apa yang menjadi saran dan masukan dari DPRD Kota Medan pada masing-masing Fraksi.

"Sebagian besar memuaskan, walaupun ada sebagian yang mungkin harus diperdetail jawabannya, karena tadi sifatnya jawaban tertulis. Nanti dalam Pansus kami akan pertanyakan lebih tajam, sehingga jawabannya menjadi lebih komplit", kata Rajudin Sagala. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.




IHWAN RITONGA : **Alhamdulillah hari ini sudah kita paripurnakan dan mereka setuju untuk dijadikan Ranperda**

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan sekaligus Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan, **Senin** (08/08/2022).

Rapat ini merupakan lanjutan dari Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rapat Paripurna yang lalu.

Dalam nota Jawaban Pengusul atas Ranperda tentang Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang disampaikan oleh Perwakilan Pengusul, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., para Pengusul Ranperda tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sepakat dengan fraksi-fraksi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Ranperda ini harus disetujui menjadi inisiatif DPRD Kota Medan serta dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi misi pembangunan Kota Medan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., mengatakan rapat ini merupakan persetujuan untuk dijadikan Ranperda, agar ada perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Medan terhadap disabilitas dan supaya mereka mendapat bantuan seperti fasilitas dan bantuan lainnya dengan harapan kedudukan mereka sama dengan masyarakat lainnya. "Ini merupakan aspirasi dari teman-teman DPRD yang ada di DPRD Kota Medan untuk menyahuti disegala aspek. Alhamdulillah hari ini sudah kita paripurnakan dan mereka setuju untuk dijadikan Ranperda", kata Ihwan Ritonga.



Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan lainnya berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Sosialisasi Pelaksanaan Nota Dinas Elektronik pada Fitur e-Jadin pada Aplikasi SMART-WAN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan



MEDAN - Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Sosialisasi Nota Dinas Elektronik pada Fitur e-Jadin Aplikasi SMART-WAN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, **Selasa** (09/08/2022).

Sosialisasi ini dibuka oleh Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Andres Willy Simanjuntak, S.H., dan diikuti oleh para Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional/Subkoordinator di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta hadir sebagai narasumber, Qomari Sigit Purnomosidi. Sosialisasi ini berlangsung di Ruang Rapat Badan

Musyawahar DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Rapat BAPEMPERDA DPRD Kota Medan terkait Pembahasan Ranperda Prioritas

MEDAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan melaksanakan rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prioritas, **Selasa** (09/08/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Dedy Aksyari Nasution, S.T., selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan ini dihadiri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Bagian Hukum Setda Kota Medan, serta Anggota Bapemperda DPRD Kota Medan lainnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution, S.T., mengatakan rapat ini merupakan pembahasan harmonisasi terkait tiga Ranperda prioritas yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan.

"Harapan kita Perda yang akan kita terbitkan ini nantinya akan bisa bermanfaat khususnya di Kota Medan, baik masalah UMKM, masalah perlindungan anak, maupun pengelolaan aset daerah. Karena selama ini yang kita ketahui, banyak aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik, kemudian masalah perlindungan anak yang belum dilindungi dengan baik, dan masalah UMKM yang belum terkoordinir dengan baik", kata Dedy Aksyari. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Kota Medan terkait Pengambilan Paksa Rumah Warga oleh PT. KAI Divre SUMUT



MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan warga mengenai dugaan pengambilan paksa rumah warga atas nama Alm. H. Chalik Anwar yang terletak di Jalan Angsana Nomor 1 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur oleh PT. KAI Divre I Sumatera Utara, **Selasa** (09/08/2022).

RDP ini dipimpin oleh Roby Barus, S.E., M.A.P., selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan dan dihadiri oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan lainnya, perwakilan PT. KAI Devisi Regional I Sumatera Utara, perwakilan Dandim 0201/BS, serta Fatia Andryani selaku ahli waris dari Alm. H. Chalik Anwar. RDP ini merupakan bentuk mediasi yang diberikan oleh Komisi 1 DPRD Kota Medan atas permasalahan sengketa rumah dan lahan yang diduga ditertibkan paksa yang dilakukan oleh PT. KAI.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Roby Barus, S.E., M.A.P., mengatakan rapat ini merupakan masalah penertiban lahan sebuah rumah dimana PT. KAI menertibkan aset, tapi pihak ahli waris keberatan karena surat yang dikeluarkan oleh PT. KAI bukan atas nama ahli waris dari Alm. H. Chalik Anwar, tetapi atas nama orang lain yang menempati rumah tersebut.

"Rapat hari ini masih rapat perdana, kita minta kepada kedua belah pihak untuk melengkapi dokumen-dokumennya, nanti Komisi 1 melakukan rapat internal untuk mengevaluasi seperti apa dokumen serta masalah hak dan kepemilikan dari masing-masing yang bersengketa ini, baik ahli waris maupun PT. KAI", kata Roby Barus.

Roby Barus juga berharap jika nanti dokumen menyatakan bahwasannya rumah dan lahan tersebut milik ahli waris, maka PT. KAI harus patuh dengan hukum. Begitu juga sebaliknya, ahli waris harus rela melepaskan lahan tersebut jika itu memang milik negara. RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Persiapan Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia



MEDAN - Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan rapat persiapan dalam rangka pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022 mendatang, **Jumat** (12/08/2022). Rapat ini dipimpin langsung Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., dan dihadiri para Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional/Subkoordinator di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, Tim SMART-WAN Sekretariat DPRD Kota Medan, serta hadir sebagai narasumber, Qomari Sigit Purnomosidi, S.Kom. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Medan.

Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan

terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022



MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan dan finalisasi terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Senin** (15/08/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat ini merupakan finalisasi pembahasan KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dimana terdapat penambahan pagu anggaran untuk program-program prioritas Kota Medan.

Sementara itu, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan mengatakan bahwa perlu diketahui kebijakan KUA PPAS ialah untuk menyesuaikan pagu anggaran yang diasumsikan ternyata masih ada perubahan dan kekurangan.

"Setelah melalui beberapa waktu untuk pembahasan, hari ini kita telah melakukan finalisasi dan menyepakati beberapa rekomendasi kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Medan. Ada beberapa penambahan pagu anggaran diberbagai OPD untuk penyesuaian dan tentunya untuk penambahan-penambahan anggaran untuk skala prioritas", kata Bahrumsyah.

Skala prioritas Pemerintah Kota Medan diantaranya untuk permasalahan jalan berlubang, penanganan banjir dengan pembangunan drainase secara kawasan yang selama ini dilakukan secara parsial tidak menyelesaikan masalah, mempercepat beroperasinya Rumah Sakit Medan Labuhan, serta BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian dan skala prioritas Pemerintah Kota Medan.

Bahrumsyah berharap anggaran APBD Tahun 2022 dapat diserap dengan baik dan dirasakan manfaatnya untuk warga Kota Medan sehingga meminimalisir SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada tahun 2022.

"Kami berharap apa yang telah dianggarkan pada P-APBD ini mampu diserap oleh OPD yang kemudian hasil daripada APBD 2022 ini dapat dirasakan oleh masyarakat, dan kita berharap tidak lagi menimbulkan SiLPA yang begitu besar di tahun 2022 ini, tentunya dengan semangat Kolaborasi Medan Berkah", tutupnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta OPD terkait.



RDP Komisi 4 DPRD Kota Medan

terkait Permasalahan Infrastruktur dan Bangunan yang menyimpang SIMB

MEDAN - Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan OPD terkait mengenai Permasalahan Infrastruktur dan Bangunan Menyimpang dari SIMB, **Senin** (15/08/2022).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T., didampingi Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan lainnya yang dihadiri Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, perwakilan Kecamatan/Kelurahan, serta para warga yang bersangkutan.

Rapat ini merupakan bentuk tanggapan dari Komisi 4 DPRD

Kota Medan terkait adanya laporan pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan infrastruktur dan bangunan-bangunan ilegal yang tidak sesuai dengan SIMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan kondisi fisik bangunan di lapangan.

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T, mengatakan Komisi 4 DPRD Kota Medan telah melaksanakan tindak lanjut surat-surat masuk yang ada di sekretariat komisi, dan memanggil beberapa OPD terkait evaluasi kinerja dan masalah banyaknya bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin di Kota Medan.

"Kami mengingatkan kepada OPD mengenai bangunan-bangunan yang ada di Kota Medan harus ditertibkan jika tidak memiliki izin, apalagi itu salah satu penunjang PAD Kota Medan. Kemudian ada laporan warga mengenai bangunan yang tadinya tempat kos berubah menjadi hotel, banyak masyarakat yang tidak berkenan adanya bangunan tersebut, sehingga menimbulkan kekisruhan", kata Haris Kelana

RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.





Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Senin** (16/08/2022).

Rapat Paripurna ini merupakan hasil pembahasan dan finalisasi dari Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan tentang KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam Laporan Hasil Pembahasan KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., mengatakan bahwa rekomendasi DPRD terkait pokok-pokok pikiran yang diakomodir pada beberapa OPD menjadi kesepakatan bersama yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan KUA dan PPAS yang disetujui bersama.

"Dengan adanya perubahan asumsi pada pendapatan daerah, Pemerintah Kota Medan dalam hal ini TAPD Kota Medan diminta untuk melakukan harmonisasi, penyesuaian dan penyelarasan sebagaimana perlunya pada anggaran belanja daerah khususnya anggaran belanja barang dan jasa", kata Ihwan Ritonga.

Sementara itu, dalam sambutannya Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 mampu mewujudkan harapan-harapan besar masyarakat dalam pembangunan kota sebagai amanah besar masyarakat.

"Melalui hubungan eksekutif dan legislatif yang semakin baik dan kolaboratif, semua harapan-harapan masyarakat dapat kita wujudkan secara bertahap dan berkelanjutan", kata Bobby Nasution.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 antara DPRD Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan.



Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI - DPD RI

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna pada Selasa 16 Agustus 2022 dengan agenda:

- 1. Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI - DPD RI**
- 2. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.**

Rapat Paripurna terlebih dahulu dibuka Ketua DPRD Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan dengan mengikuti jalannya sidang tahunan melalui layar televisi yang diawali dengan sambutan Ketua MPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.

Rapat Paripurna ini juga dilakukan secara serentak di seluruh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pidato Kenegaraan Presiden RI ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan dilakukan melalui video conference, Rapat Paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., didampingi Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Anggota DPRD Kota Medan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Ketua DPRD Kota Medan menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam Rangka Memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, **Rabu** (17/08/2022).

Upacara ini dihadiri oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., para Anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta tokoh masyarakat dan organisasi.

Upacara ini berlangsung di Lapangan Benteng Medan pukul 07.30 WIB.

Ketua DPRD Kota Medan menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia



MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, **Rabu** (17/08/2022).

Upacara ini dipimpin Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, S.E., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta tokoh masyarakat dan organisasi.

Upacara ini berlangsung di Lapangan Benteng Medan pukul 17.00 WIB.

Sekretariat DPRD Kota Medan ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia



MEDAN - Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan perlombaan dalam rangka ikut memeriahkn HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, **Jumat** (19/08/2022).

Kegiatan ini diikuti para ASN, PHL, WARTAWAN, SECURITY, dan CLEANING SERVICE di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Adapun perlombaan yang dilombakan pada kegiatan ini seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lomba lainnya yang bertujuan untuk mempererat kerja sama dan kekompakan antar individu serta memeriahkan semangat kemerdekaan.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Medan.

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Medan

MEDAN - Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan pertemuan rutin di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, **Selasa** (23/08/2022).



Pertemuan ini dipimpin oleh Ny. Rina Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., selaku Ketua Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kota Medan dan dihadiri anggota Dharma Wanita lainnya.

Kegiatan rutin ini diisi dengan Sosialisasi Pencegahan dan Pengobatan Kanker dan Tumor dari Yayasan Kanker Indonesia sebagai narasumber.

Ny. Rina Ali Sipahutar berharap dengan adanya sosialisasi pencegahan kanker dan tumor ini dapat menjadi ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari pola makan dan gaya hidup sehat.

"Semoga dengan adanya sosialisasi pencegahan kanker dan tumor ini dapat membantu kita dalam menjalankan hidup sehat, pola makan yg teratur, dan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sehingga hal-hal buruk penyebab kanker/tumor dapat dicegah", tutupnya.



Rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023

MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, **Rabu** (24/08/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta OPD terkait lainnya.



Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait (KUA) - (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023

MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, **Senin** (29/08/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta OPD terkait lainnya.





Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif dalam Hasil Raker DPRD Kota Medan menghasilkan Renja Tahun 2023 guna terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2022, **Senin** (29/08/2022).

Perlu diketahui bahwa hasil Raker DPRD Kota Medan ini merupakan salah satu bentuk tri fungsi dewan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah.

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan bahwa rapat ini terkait Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2022 yang menghasilkan Rencana Kerja (Renja) untuk DPRD Kota Medan Tahun 2023. Renja yang telah disetujui menjadi satu bentuk keputusan DPRD Kota Medan yang nantinya akan menghasilkan kinerja-kinerja lebih baik lagi ke depannya, sehingga nanti menghasilkan hal-hal yang lebih baik yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan.

"Kita mengharapkan kolaborasi eksekutif dan legislatif yang kuat dan harmonis agar bisa berjalan dengan baik. Melalui Renja ini kita harapkan dari pihak eksekutif juga harus memberikan satu perhatian dan dukungan agar Rencana Kerja di DPRD Kota Medan yang sudah tersusun itu bisa berjalan dengan baik", kata Hasyim.

Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Medan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Laporan Hasil Raker DPRD Kota Medan Tahun 2022 dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan yang semakin baik guna terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif.

"Melalui Sidang Paripurna ini, saya minta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk dapat segera merespon dan menindaklanjuti Laporan Hasil Raker DPRD Kota Medan ini, sehingga dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang ada. Saya yakin dengan kolaborasi dan kemitraan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif kita mampu mewujudkan pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021", kata Aulia Rachman.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.





Hasyim, S.E. : Inovasi itu sangat penting sekarang ini, Tanpa inovasi semua segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan berkembang maju

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, **Senin (29/08/2022)**.

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., mengatakan bahwa perlunya suatu regulasi di tingkat daerah Kota Medan yang mengatur inovasi daerah sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru.

"Kami berharap semoga Ranperda yang dimaksud dapat kita bahas bersama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat melahirkan suatu peraturan daerah yang baik", kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan bahwa Rapat Paripurna ini terkait dengan bagaimana pemerintahan daerah yang baik, bagus dan kuat tentu harus punya inovasi yang merupakan terobosan ke depan, sehingga perjalanan kepemerintahan itu menjadi lebih baik, terarah serta menghasilkan hal-hal baik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan.

"Inovasi itu sangat penting sekarang ini. Tanpa inovasi semua segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan berkembang maju. Melalui inovasi ini kita harapkan semua kegiatan, program, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan berjalan dengan baik, lebih terarah dan lebih maju lagi ke depannya", katanya.

"Pemerintah Daerah Kota Medan perlu berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui inovasi tata kelola pemerintahan daerah", tandas Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.



Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Coaching Clinic Pendampingan Zona Integritas

Medan – Dalam rangka percepatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Coaching Clinic Pendampingan Zona Integritas, **Selasa** (30/08/2022).

Coaching Clinic ini dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., mewakili Sekretaris DPRD Kota Medan, dan dihadiri oleh Kepala Bagian, Pejabat Fungsional/Subkoordinator, ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta hadir sebagai narasumber, Dr. Fahrurrazi, M.Si., dan berlangsung selama dua hari.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat lanjutan pembahasan terkait (KUA) - (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023

MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, **Selasa** (30/08/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.



Sekretariat DPRD Kota Medan mengikuti Pelaksanaan Tahap Delivery Inovasi Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022



MEDAN – Dalam rangka Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi, Sekretariat DPRD Kota Medan mengikuti tahap Delivery Inovasi setelah sebelumnya melaksanakan Design Inovasi bertempat di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Jakarta, **Kamis** (01/09/2022).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi (Pembangkom) ASN LAN RI dan Tim Coach dari Pembangkom LAN RI sebagai narasumber. Tahap Delivery Inovasi bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi perbaikan dalam pelaksanaan inovasi atau membuat alternatif inovasi lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Pembangkom ASN LAN RI, Drs. Seno Hartono, DESS., mengatakan kegiatan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi di Sekretariat DPRD Kota Medan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan tahun ini bertujuan untuk mengevaluasi ide-ide inovasi yang sudah ada dan sudah diimplementasikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Kegiatan evaluasi ini menjadi sangat penting dan krusial, karena jangan sampai banyak ide kreatif, banyak inovasi yang bagus namun tidak dapat menjadi solusi, dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. “Semoga inovasi yang telah kita evaluasi dan perbaiki bersama mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD sekaligus memberi pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan pada khususnya dan masyarakat Kota Medan pada umumnya sebagai stakeholder Sekretariat DPRD Kota Medan”, kata Seno Hartono.

Sementara itu, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., selaku Sekretaris DPRD Kota Medan, mengatakan Sekretariat DPRD Kota Medan saat ini semakin berbenah, melalui langkah-langkah strategis dan upaya maksimal, komitmen yang tinggi, semangat paripurna disertai peningkatan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan, coaching dan mentoring, benchmarking, termasuk perbaikan karakter para ASN Setwan Kota Medan melalui character building.

“Satu langkah konkrit yang telah dilakukan adalah saat ini Setwan sedang mengikuti lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sedang mempersiapkan diri masuk dalam ajang IGA (Innovative Government Award) Kemendagri. Untuk itu kami sangat berharap bimbingan dari LAN RI agar nantinya bermanfaat untuk peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Setwan yang lebih baik yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan organisasi berkinerja tinggi”, tandas Ali Sipahutar.



Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, **Senin (05/09/2022)**.

Rapat ini merupakan lanjutan dari jawaban pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan sekaligus Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan pada Rapat Paripurna 8 Agustus yang lalu. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan permasalahan sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, spiritual, hukum, maupun keamanan. Permasalahan sosial tentunya harus ditangani melalui suatu upaya yang tepat dan terintegrasi. Salah satu permasalahan sosial yang sering kita lihat sehari-hari adalah permasalahan kesejahteraan sosial.

“Penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan masih menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses dan melakukan pengembangan diri baik dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak hingga aspek lain seperti jalan dan transportasi. Untuk itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia”, kata Hasyim.

Dalam Nota Pengantar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., mengatakan pentingnya perwujudan Peraturan Daerah Kota Medan untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas, karena dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Medan untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran dalam perlindungan disabilitas. Selain itu, Faktor usia bagi penduduk lanjut usia menjadikannya memerlukan perlindungan berupa bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya karena menghadapi keterbatasan, sehingga perlu perhatian pemerintah daerah melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

“Ranperda ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan serta harus dibahas dan dikaji lebih mendalam melibatkan pihak-pihak yang terkait mengingat belum ada Perda yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan, maka kami menyarankan untuk segera dibentuk panitia khusus”, kata Ihwan Ritonga.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. T. BahrumSyah, S.H., M.H., mengatakan terkait dengan disabilitas lebih kurang ada Sembilan turunan yang mengatur tentang disabilitas. Nanti kita akan melihat hak inisiatif DPRD ini, bagaimana tanggapan Wali Kota apakah diperlukan Perda tersebut atau sudah ada aturan-aturan yang mengikat di Undang-Undang.

“Kalau aturan semua sudah diatur, itu ada pertimbangan lain. Tapi kalau ada aturan yang memang perlu diatur dan belum diatur, saya pikir Perda ini solusinya. Begitu juga dengan lansia sudah ada turunannya dan aturannya, seperti program-program lansia, bagaimana memperlakukan lansia. Kalau memang ada persamaan persepsi bahwa ini perlu Perda, tentunya kita akan melahirkan Perda baru, jadi kita tunggu”, tandas BahrumSyah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. BahrumSyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ini ditutup dengan Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan.





Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 dan Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 dan Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Senin (05/09/2022)**.

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriyah Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

DPRD Kota Medan memiliki agenda prioritas pada Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 ini seperti pembahasan P-APBD Kota Medan Tahun 2022, pembahasan R-APBD Kota Medan Tahun 2023, pembahasan beberapa Ranperda Kota Medan, dan agenda kegiatan lainnya.

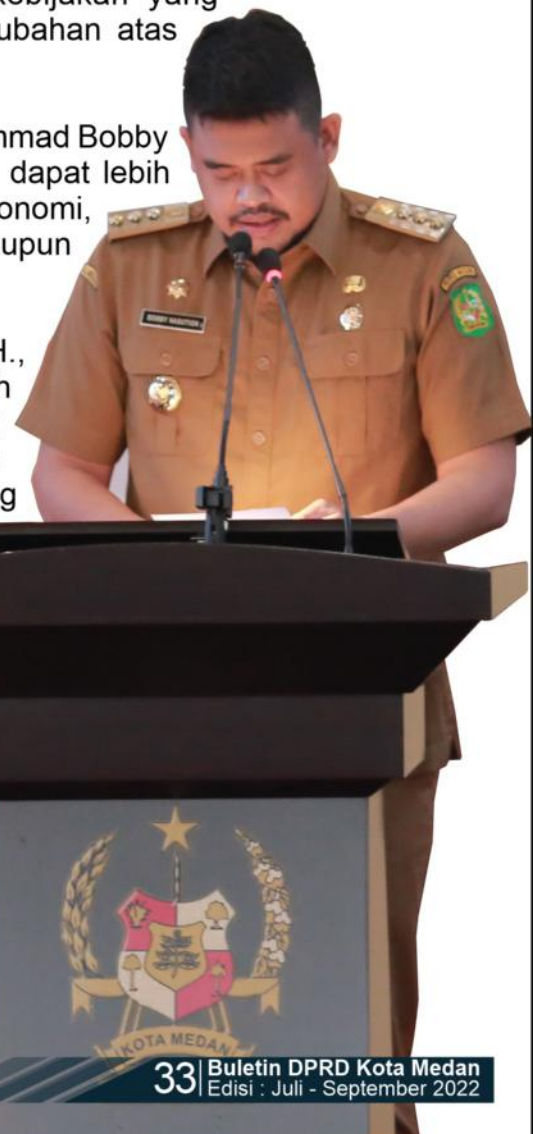
Selanjutnya, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022. Nota Pengantar ini merupakan adanya perubahan prakiraan oleh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang didorong oleh perbedaan atau pergeseran asumsi-asumsi dasar kebijakan yang ditetapkan pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran), dan adanya perubahan atas APBD tahun anggaran berjalan.

Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengatakan Nota Pengantar ini diharapkan dapat lebih melengkapi penjelasan tentang perubahan-perubahan asumsi makro ekonomi, serta kerangka anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan dalam perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., mengatakan Pemerintah Kota Medan mempunyai SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang sangat tinggi pada tahun 2021, sehingga tempat untuk mengevaluasi ulang SiLPA ialah di Perubahan APBD. Pada P-APBD juga akan mengevaluasi beberapa program-program yang dianggap skala prioritas.

“Akhirnya kita di Badan Anggaran DPRD Kota Medan telah melakukan kesepakatan pada KUA-PPAS. Hari ini Wali Kota Medan telah menyampaikan Nota Pengantar terkait dengan P-APBD 2022, dimana dalam P-APBD 2022 ini kita akan mengevaluasi beberapa program kegiatan yang mendesak untuk dapat segera diprioritaskan, baik dari sisi pendidikan, sarana dan prasarana, Kesehatan dan khususnya terhadap urusan wajib pelayanan dasar”, tandas Bahrumsyah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.



Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima kunjungan Siswa/Siswi SMP ST. Yoseph Pemuda Medan



MEDAN – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima kunjungan Siswa/Siswi SMP ST. Yoseph Pemuda Medan, **Senin** (05/09/2022).

Para Siswa/Siswa ini diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung jalannya Sidang Paripurna DPRD Kota Medan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa yang berhubungan dengan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX tentang “Kedaulatan” dalam pelaksanaan program Sekolah ST. Yoseph Pemuda Tahun Pembelajaran 2022/2023.

Kunjungan yang dihadiri 126 orang Siswa dan 2 orang Guru pendamping ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023



MEDAN - Badan Anggaran DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, **Kamis** (08/09/2022).

Rapat lanjutan ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan beserta OPD terkait yg ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Coaching Clinic Kualitas Pengelolaan Arsip dalam rangka upaya pemenuhan pengungkit Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan



MEDAN – Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Coaching Clinic Kualitas Pengelolaan Arsip dalam rangka upaya pemenuhan pengungkit Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, **Kamis** (08/09/2022).

Coaching Clinic ini dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., dihadiri oleh Kepala Bagian, dan Pejabat Fungsional Kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta hadir sebagai narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Coaching Clinic e-Reses di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan



Medan – Dalam rangka pengembangan fitur e-reses pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan (SMART-WAN), Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Coaching Clinic e-Reses dengan narasumber yang kompeten, **Kamis** (08/09/2022).

Coaching Clinic ini dibuka oleh Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., dan dihadiri oleh Kepala Bagian, Pejabat Fungsional/Subkoordinator, ASN dan PHL di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta Qomari Sigit Purnomosidi, S.Kom., sebagai narasumber.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Kamis (08/09/2022)**.

Rapat ini merupakan tanggapan dari Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Wali Kota Medan pada Rapat Paripurna 5 September yang lalu.

Dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan ini menjelaskan tentang perbaikan, kritik yang membangun serta evaluasi, baik dari program dan kegiatan maupun penganggaran yang akan dilaksanakan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., mengatakan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan telah menyampaikan tanggapan atau pandangan umum terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan dan masukan terhadap Pemerintah Kota Medan, masukan/kritik yang dimaksud mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan regulasi.

“Harapan kita kepada Pemerintah Kota Medan untuk dapat menelaah semua pandangan fraksi, semua kritikan yang membangun yang dilakukan oleh DPRD untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota Medan mulai dari perencanaan, penganggaran, maupun pengawasan”, kata Bahrumsyah.

Rapat Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Maulana Lubis Nomor 1 Medan dan ditutup dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pengantar Kepala Daerah atas P-APBD Kota Medan Tahun 2022 oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wakil Wali Kota Medan.

Jalan Kaptan penyerahan Nota terhadap Nota Medan tentang Ke



Pemerintah Kota Medan sependapat dengan Inisiatif DPRD Kota Medan terkait Pengusulan Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pendapat Kepala Daerah terkait Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, **Senin** (12/09/2022).

Rapat ini merupakan lanjutan dari Penyampaian Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rapat Paripurna 5 September yang lalu.

Dalam Nota Pendapat Kepala Daerah terkait Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., mengatakan Pemerintah Kota Medan menyambut baik serta mengapresiasi atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Inisiatif DPRD Kota Medan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Menyikapi masih banyaknya kelemahan dalam perlindungan penyandang disabilitas di Kota Medan, diantaranya di kantor pemerintahan khususnya pada pelayanan publik, nantinya akan disikapi dan diperhatikan bersama dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan tempat di tengah masyarakat, begitu juga dengan perlindungan lanjut usia. Lansia sering mengalami berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi, sosial, kesehatan, psikis, dan fisik yang sangat serius seperti halnya menurunnya penghasilan/pendapatan lansia. Oleh sebab itu, dibutuhkan Ranperda sebagai payung hukum kebijakan terutama sekali masalah penyandang disabilitas dan lanjut usia”, kata Aulia Rachman.

“Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Medan atas inisiatif terhadap Ranperda tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, dan akan kita bahas bersama stakeholder terkait sehingga akan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota

Medan”, sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan Nota Pendapat Kepala Daerah hampir sama dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari DPRD Kota Medan dalam inisiatif Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Artinya kepala daerah mengapresiasi untuk melahirkan Perda yang nantinya memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.

“Pada kesempatan ini juga kita mengapresiasi kembali kepada kepala daerah yang dalam hal ini Wali Kota Medan yang telah memberikan nota pendapat yang artinya sudah sependapat dengan DPRD Kota Medan dengan inisiatifnya berupa Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Karena dianggap perlu adanya payung hukum yang melindungi penyandang disabilitas dan lanjut usia, baik mendapatkan pelayanan publik, fasilitas yang lebih memadai, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan kerja yang lebih optimal yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia”, tandas Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ini ditutup dengan penyerahan Nota Pendapat Kepala Daerah terkait Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.



Penandatanganan Nota

Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023, **Selasa** (13/09/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan. Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan dan para OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan terkait R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

Dalam Laporan Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan dengan TAPD Kota Medan dalam Pembahasan KUA-PPAS R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd. I., menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD terkait pokok-pokok pikiran yang diakomodir pada beberapa OPD menjadi kesepakatan bersama yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan KUA dan PPAS yang disetujui bersama. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan harmonisasi, penyesuaian dan penyelarasan sebagaimana perlunya pada anggaran belanja daerah khususnya pada anggaran belanja.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengatakan masalah dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi cukup berat dan kompleks. Oleh karena itu, APBD yang ditetapkan juga harus efektif untuk mengantisipasi berbagai tantangan eksternal maupun internal yang ada seperti menjaga daya beli masyarakat, membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM, mengembangkan iklim investasi yang kondusif, dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang menjadikan aktivitas ekonomi bekerja efisien.

“Hal inilah yang kita maksudkan agar APBD didesain menjadi APBD yang sehat dan APBD yang berbasis kesejahteraan. Saya ingin berikan apresiasi karena pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang relatif tepat waktu. Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan dapat segera menyampaian Nota Pengantar R-APBD Tahun Anggaran 2023. Saya yakin melalui hubungan eksekutif dan legislatif yang semakin baik dan kolaborasi, semua harapan dan tujuan masyarakat dalam pembangunan kota dapat kita wujudkan secara bertahap dan berkelanjutan”, kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 tentu diharapkan ke depannya Pemerintah Kota Medan di dalam penyusunan R-APBD Tahun 2023 harus mengacu pada KUA-PPAS R-APBD Tahun 2023 yang telah disepakati.

“Nanti akan kita lihat dalam Nota Pengantar Kepala Daerah, kemudian nanti akan dipelajari oleh masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan yang kemudian akan disampaikan dalam bentuk pandangan umum. Kita berharap Rancangan APBD Tahun 2023 harus sama dengan hasil kesepakatan KUA-PPAS yang sudah dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Medan dalam hal ini TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kota Medan”, kata Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 oleh Pimpinan DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan.

Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, **Selasa** (13/09/2022).

Rapat ini merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah pada 29 Agustus yang lalu.

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam rapat ini, masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, di mana masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyetujui adanya Ranperda tentang Inovasi Daerah yang dianggap perlu untuk dijadikan suatu payung hukum.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan, pandangan umum yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyetujui pentingnya inovasi daerah agar daerah tersebut khususnya Kota Medan memiliki pelayanan yang lebih baik, dari segi birokrasi juga menjadi lebih baik. Sehingga nantinya masyarakat Kota Medan akan mendapatkan suatu pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya, baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan dalam mendapatkan sarana dan prasarana yang tercakup melalui inovasi daerah.

“Kita masih melihat seperti apa nanti jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda tentang Inovasi Daerah”, kata Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan berkas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan.

Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Pendampingan untuk Rencana Tindak Pengendalian SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan

MEDAN – Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan penyusunan Indeks Manajemen Resiko dalam kerangka penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Pendampingan untuk Rencana Tindak Pengendalian SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, **Senin** (19/09/2022).



Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., dihadiri oleh Kepala Bagian, Pejabat Fungsional/Subkoordinator dan Tim SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, serta hadir sebagai narasumber yang kompeten Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Komisi 4 DPRD Kota Medan kembali melaksanakan RDP dengan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lapangan Merdeka Medan (KMS Peduli LMM) dan para OPD terkait

MEDAN – Terkait dengan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, Komisi 4 DPRD Kota Medan kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lapangan Merdeka Medan (KMS Peduli LMM) dan para OPD terkait, **Selasa** (27/09/2022).

RDP ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T., didampingi oleh para anggota Komisi 4 lainnya, serta dihadiri beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, dan Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kota Medan.

Dalam pembahasannya, masyarakat yang tergabung dalam KMS Peduli LMM ini meminta agar DPRD Kota Medan khususnya kepada Komisi 4 DPRD Kota Medan untuk lebih serius dan komprehensif dalam menanggapi permasalahan pro dan kontra terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, S.T., mengatakan dengan banyaknya agenda kegiatan, DPRD Kota Medan tetap mengoptimalkan dalam mengambil celah dan langkah untuk memperhatikan setiap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat termasuk Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan.

“Setelah kita klarifikasi melalui pertemuan RDP terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka ini, insya Allah semua dapat menerima. Nanti bagaimana lanjutan mengenai revitalisasi ini ke depannya akan dijadikan notulen, karena prinsipnya Lapangan Merdeka ini bukan hanya milik perorangan tetapi milik masyarakat yang akan menjadi ikon cagar budaya Kota Medan yang tidak terlepas dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara”, kata Haris Kelana.

Kemudian RDP Komisi 4 DPRD Kota Medan ini dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu RDP terkait juru parkir di area Komplek Asia Mega Mas dan juga dihadiri para OPD terkait. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Paripurna dalam rangka Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, **Senin** (19/09/2022).

Rapat ini merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah pada 13 September yang lalu.

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam Nota Tanggapan Kepala Daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjawab seluruh pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Inovasi Daerah, seperti menanggapi salah satu pandangan umum Fraksi DPRD Kota Medan mengenai inovasi daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan yaitu antara lain berupa e-SAKIP, e-Kinerja, Simpeg, dan lainnya.

"Semoga jawaban, keterangan maupun penjelasan yang kami sampaikan dapat lebih melengkapi pemahaman bersama Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan dalam penyempurnaan penyusunan Ranperda ini. Kami berharap, agenda pembahasan selanjutnya terhadap Ranperda ini dapat segera dilaksanakan hingga dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah", kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan setelah dikaji dan dicermati, bahwa jawaban/tanggapan kepala daerah sudah sangat substansi apa yang menjadi pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan. Jika ada yang kurang, nantinya di Rapat Panitia Khusus (Pansus) akan dilakukan pendalaman lagi terhadap jawaban dari kepala daerah, sehingga nanti melahirkan Perda tentang Inovasi Daerah yang bisa mendukung pelayanan yang lebih baik lagi, lebih transparansi, dan lebih memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi dari Pemerintah Kota Medan.

"Kita mengapresiasi dan kita berharap pembahasan yang dilakukan oleh Pansus bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nanti menghasilkan Perda yang berkualitas yang tujuannya untuk kemajuan Pemerintah Kota Medan termasuk DPRD Kota Medan. Kita di DPRD Kota Medan sudah mempunyai inovasi yang bernama SMART-WAN (Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan) yang sudah cukup baik dan sudah berjalan beberapa tahun. Saya pikir Pemko Medan juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang dapat membuat sistem pemerintahannya menjadi lebih modern, lebih transparansi dan efektif", tandas Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.



Hasyim S.E. : Lahirnya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan membuat suatu data yang lebih jelas terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, **Senin** (19/09/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Perlu diketahui, aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah.



Dalam Nota Pengantar Kepala Daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., mengatakan secara umum sasaran pokok pengelolaan barang milik daerah yaitu terwujudnya tertib administrasi, tertib yuridis, dan tertib fisik barang milik daerah. Aset yang tidak dikelola secara efektif, justru cenderung menambah beban biaya seperti biaya perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya Pasal 511 Ayat 1, dinyatakan bahwa perlunya menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kota nantinya memiliki payung hukum yang lengkap dalam menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disampaikan ini, juga dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan tentang pemanfaatan kekayaan daerah, guna mendorong pengelolaan barang milik daerah lebih produktif dalam proses pembangunan secara keseluruhan”, kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu hal yang mutlak dan harus, karena ini mengatur tentang barang milik daerah atau aset-aset yang perlu dicatat dengan jelas, tidak dipindahtanggankan, harus transparansi dan terdata dengan baik.

“Lahirnya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan membuat suatu data yang lebih jelas terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan, sehingga tidak terjadi pemindahtanganan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir ini suatu terobosan yang baik dan perlu kita apresiasi”, tandas Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.

Paripurna dalam rangka Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), **Selasa (20/09/2022)**.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan saat ini UMKM sudah bersaing dan menghadapi berbagai disrupsi. Banyak usaha tumbang dan selalu gigih berdiri kembali atau banting setir memilih jenis usaha dan bentuk yang lain. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pembangunan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi sosial.

“Untuk itu, pada hari ini kita mendengar penjelasan dari pengusul menyampaikan Ranperda dimaksud, kami berharap kita dapat mencermati dan seterusnya menanggapi yang pada akhirnya kita setuju menjadi usul dari DPRD Kota Medan”, kata Hasyim.

Sementara itu, dalam penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibacakan oleh Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., mengatakan bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah melakukan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa UMKM agar dapat bertahan dan bersaing dengan UMKM dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, perlu Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM Kota Medan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan UMKM yang berada di Kota Medan agar bisa terlindungi dan mampu berkembang dalam pemasarannya di tengah-tengah persaingan usaha di mana saat ini begitu banyak tumbuhnya usaha-usaha modern di Kota Medan.

“Dengan adanya peraturan yang berpihak kepada UMKM lokal, diharapkan UMKM di Kota Medan dapat naik kelas dengan terbangunnya hubungan sinergitas dengan usaha-usaha modern di Kota Medan akan terjadi transfer knowledge dan teknologi dari kemitraan yang dibangun antara usaha modern dengan UMKM di Kota Medan. Di samping itu, diharapkan juga akan menumbuhkan pasar bahan baku atau komoditas baru di Kota Medan dengan adanya peraturan perlindungan dan pengembangan UMKM ini.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. BahrumSyah, S.H., M.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan.





Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan

MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan, **Selasa** (20/09/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.

“Maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia”, kata Hasyim.

Sementara itu, dalam Nota Pengantar Kepala Daerah yang disampaikan oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M., mengatakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25 B mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi di Kota Medan yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mengusulkan Rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Diharapkan dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan berdampak bagi masyarakat dan pihak lainnya secara positif”, kata Bobby Nasution.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan Nota Tanggapan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.

IHWAN RITONGA : Ranperda ini nantinya benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh Kelompok Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Tanggapan DPRD Kota Medan terhadap Pendapat Kepala Daerah Kota Medan atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, **Senin** (26/09/2022).

Rapat ini merupakan lanjutan dari Pendapat Kepala Daerah terkait Nota Pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rapat Paripurna 12 September yang lalu.

Dalam Nota Tanggapan DPRD Kota Medan yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., mengatakan pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak dan stakeholder. Program perlindungan sosial, bantuan sosial, dan aksesibilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia yang diakomodir dalam pembahasan Ranperda ini nantinya benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan.

“Kami berharap Ranperda ini mendapat persetujuan dari seluruh Anggota DPRD Kota Medan, agar secepatnya dibahas oleh panitia khusus dan menjadi Perda Kota Medan serta dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi misi pembangunan Kota Medan”, kata Ihwan Ritonga.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., mengatakan pembahasan terkait Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia akan dibahas melalui panitia khusus yaitu perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan.

“Kami berharap dengan lahirnya Perda ini dapat terakomodir keluhan dari para penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah Kota Medan”, tandas Rajudin Sagala.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ini ditutup dengan penyerahan Nota Tanggapan DPRD Kota Medan terhadap Pendapat Kepala Daerah Kota Medan atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.



Akhirnya Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan TA 2022 disetujui untuk menjadi Perda Kota Medan



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan P-APBD, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, **Senin** (26/09/2022).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim S.E., didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., para Anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ini merupakan lanjutan dari Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna 12 September yang lalu. Rapat ini diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., mengatakan bahwa dengan adanya perubahan anggaran belanja langsung dan pendapatan, Pemerintah Kota Medan melalui Tim Anggaran diminta untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara DPRD Kota Medan dengan Tim Anggaran dan seluruh OPD di Kota Medan.

“Perlu kerjasama dan koordinasi dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan agar waktu yang terbatas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif”, kata Rajudin. Kemudian rapat ini dilanjutkan dengan penandatanganan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan dan TAPD Kota Medan yang telah membahas dengan cermat rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga telah dilakukan penandatanganan persetujuan bersama yang nantinya akan dituangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Sebagai APBD “yang baik”, maka dalam pelaksanaan nantinya diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi, sehingga masyarakat kota dapat merasakan manfaat dan dampak positif yang lebih nyata, khususnya terhadap perekonomian kota sekaligus peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan”, kata Bobby Nasution. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan dengan adanya penambahan belanja yang cukup besar, diharapkan realisasi dari anggaran belanja tersebut harus optimal dan semaksimal mungkin, agar tidak lagi terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) seperti tahun 2021.

“Anggaran belanja dan pendapatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, terutama lima program prioritas Wali Kota Medan seperti infrastruktur jalan, drainase, pendidikan dan terutama pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan adanya penambahan pada P-APBD sebesar 100.000 BPJS PBI, diharapkan program UHC (Universal Health Coverage) di tahun 2023 sudah bisa berjalan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Medan semakin baik. Jadi kita harapkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif harus ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing dengan memaksimalkan serapan realisasi anggaran seoptimal mungkin”, tandas Hasyim.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini ditutup dengan penyerahan berkas Laporan Hasil Pembahasan P-APBD dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan.